



Buletin Parlementaria



3 DPR Minta Pemerintah Atasi Krisis Air



4 Kunjungi Jawa Barat, Pastikan Keamanan Pilkada Serentak



Setuju Mafia Tanah Dimiskinkan, Usulkan Ada Satgas Khusus



Kritik Wacana Impor Sapi, Sementara Peternak Lokal Kesulitan

Nomor 1319/IV/XI/2024 November 2024



9 772614 339005



Hasilkan UU Terbanyak Sepanjang Sejarah

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi penghargaan Rekor MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) yang diberikan kepada Komisi II DPR RI Periode 2019-2024. Hal itu lantaran Komisi II sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menyelesaikan undang-undang terbanyak sepanjang sejarah dalam satu periode masa tugas 2019-2024 sebanyak 160 UU.

“Saya sangat bangga dengan apa yang kita capai bersama-sama dalam lima tahun kemarin di Komisi II. Ini mampu membuktikan bahwa kinerja kita luar biasa. Apa yang telah dilakukan Komisi II ini juga memberi

dampak pada keseluruhan institusi DPR RI ini,” ujar Saan saat membuka acara penyerahan penghargaan rekor MURI kepada Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, selasa (5/11).

Legislator yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2019-2024 ini menilai penghargaan ini sejatinya ke depan juga menjadi pemicu agar DPR RI periode 2024-2029 mendatang dalam pembuatan undang-undang yang tidak hanya menumpuk di komisi II saja.

“Ini menjadi salah satu catatan agar penyebaran terkait soal legislasi ini bisa semakin merata. Karena salah satu ukuran dari kerja DPR

yang paling nyata, paling mudah diukur kinerja DPR nya itu terlihat dari berapa target legislasi yang ditetapkan dan berapa banyak yang bisa diselesaikan,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Dalam kesempatan itu. Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan rasa sukurnya atas penghargaan tersebut. “Membuat UU ini adalah tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPR, berapapun jumlahnya. Tapi sebenarnya yang memotivasi saya adalah karena saya melihat kekompatan yang luar biasa dari anggota komisi II, periode 2019-2024,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. — **ayu/rdn**



FOTO: JAKVA/AHA

Penyerahan penghargaan rekor MURI kepada Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, selasa (5/11/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Minta Pemerintah Atasi Krisis Air



FOTO:ENO/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah krisis air yang masih melanda sejumlah daerah di tengah musim pancaroba ini. Ia meminta pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian bencana tersebut karena telah menyulitkan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Akses air bersih yang sangat terbatas telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ini bisa menimbulkan risiko tinggi penyebaran penyakit, dan berdampak pada kesejahteraan hidup rakyat,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Jumat (1/11).

Sejumlah daerah yang saat ini tengah mengalami krisis air seperti di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Krisis air di Lombok tersebut sudah terjadi beberapa bulan ke belakang. Masyarakat hanya mampu bergantung dengan batuan air bersih dari pemerintah sekitar 15 liter per hari yang menurut mereka tak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Alhasil mereka bertahan dengan menyuling air yang ada.

Puan meminta pemerintah memberi perhatian lebih serius dalam penanganan krisis air bersih ini. “Hanya bantuan air bersih yang terbatas saja tidak cukup, tapi bagaimana memastikan adanya peningkatan infrastruktur agar menjadi solusi jangka panjang. Apalagi ini sudah berlangsung lama,” ujarnya.

— aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Banyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Naual Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom.,
Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi
Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rim bani,
Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie,
Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,
Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Geraldi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.
Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M., (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Kunjungi Jawa Barat, Pastikan Keamanan Pilkada Serentak



FOTO: MUN/AHA

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan bersama tim dalam foto bersama usai pertemuan Kunsfik Komisi I di Kodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) ke Kodam (Komando Daerah Militer) III/Siliwangi dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), Bandung, Jawa Barat. Dalam Kunsfik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan ini, Komisi I ingin memastikan kesiapan ke dua lembaga tersebut dalam rangka menciptakan situasi kondusif di wilayah Jawa Barat menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Maksud dan tujuan kunspek Komisi I DPR RI ke Kodam III/Siliwangi dan Binda Jabar adalah dalam rangka meninjau kesiapan Kodam

III/Siliwangi dan Binda Jawa Barat dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman, termasuk pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat,” ucap pria yang kerap disapa Aher tersebut saat membuka rapat pertemuan Kunsfik Komisi I di Kodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (31/10).

Dalam kaitan pengamanan Pilkada Serentak 2024, TNI berperan mendukung proses penyelenggaraan agar berjalan aman. BIN sebagai badan intelijen memiliki peran strategis dalam deteksi dini, pencegahan, dan pengumpulan

informasi mengenai potensi gangguan keamanan selama masa Pilkada. BIN juga berkomitmen untuk menjaga agar Pilkada berlangsung aman, damai, dan demokratis.

Berdasarkan dari laporan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), Politisi Fraksi PKS itu mengatakan bahwa Jawa Barat berada di urutan keempat dalam daftar daerah yang memiliki kerawanan pemilu.

Adapun hasil kunjungan ini akan menjadi bahan diskusi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan RI, Panglima TNI, dan Kepala BIN, untuk memastikan kesiapan pengamanan Pilkada di berbagai wilayah. — mun/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Setuju Mafia Tanah Dimiskinkan, Usulkan Ada Satgas Khusus



FOTO: JKA/AHA

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf setuju apabila pelaku mafia tanah dimiskinkan. Ia juga mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah.

“Menurut saya, perlu dibentuk satgas khusus yang serius dalam memberikan sanksi tegas kepada mafia tanah. Satgas ini akan menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik mereka,” kata Dede Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (1/11).

Satgas penegakan hukum mafia tanah dinilai diperlukan untuk mempermudah koordinasi

antara Pemerintah dengan aparat penegak hukum. Dede berharap Satgas ini bisa menjadi terobosan dalam pemberantasan mafia tanah karena ancaman hukumannya cukup signifikan bagi pelaku.

“Kolaborasi menjadi kunci untuk menangani masalah mafia tanah. Sehingga harus ada koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang kompeten dalam hal ini dan harus ada komitmen bersama, tidak bisa dikerjakan sendiri,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menjerat mafia tanah dengan delik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Upaya pemiskinan mafia tanah dinilai penting agar memberikan dampak besar.

Untuk memulai langkah tersebut, Pemerintah akan berkoordinasi intensif dengan penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dede menyambut positif rencana tersebut karena menurutnya mafia tanah kerap terjadi akibat kurang adanya efek jera dalam penegakan hukum bagi pelaku. “Mungkin itu yang akan diupayakan dengan delik TPPU, bisa dimiskinkan. Kita lihat ide ini bagus, prinsipnya kita dukung,” ucap Dede. **aha**



KOLABORASI MENJADI KUNCI UNTUK MENANGANI MASALAH MAFIA TANAH. SEHINGGA HARUS ADA KOORDINASI DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG KOMPETEN



Dede Yusuf

Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kejati Sumsel Diapresiasi, Selamatkan Pendapatan Negara



FOTO: HUSEN/AHA

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus (kiri) usai pertemuan dengan otoritas Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Polda Sumsel di Palembang, Sumsel, Kamis (31/10/2024).

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat apresiasi dari Komisi III DPR RI atas penyelamatan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam (SDA). Ada triliunan rupiah yang bisa diselamatkan dari pidana korupsi pengelolaan SDA.

Hal itu mengemuka saat delegasi Komisi III DPR menggelar pertemuan dengan otoritas Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Polda Sumsel di Palembang, Sumsel, Kamis (31/10). Anggota Komisi III DPR Stevano Rizki Adranacus, usai pertemuan menyampaikan apresiasinya. "Kita apresiasi langkah-langkah hukum

yang sudah diambil untuk menutup kebocoran pendapatan negara dari SDA yang telah terjadi di provinsi ini lewat penambangan liar, *illegal drilling*, maupun mafia tanah."

Banyak langkah progresif penegakan hukum yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel terhadap isu-isu lingkungan hidup oleh Kajati Sumsel. Komisi III DPR, kata politisi PDI Perjuangan ini, sangat mendukung langkah hukum yang diambil Kajati Sumsel dalam menyelamatkann SDA Sumsel dari kerusakan dan kerakusan.

Sumsel, lanjut Stevano, merupakan wilayah yang kaya dengan SDA. Namun, ironis, Sumsel juga sekaligus masuk dalam daftar 10 besar daerah miskin di Tanah Air. Kekayaan SDA yang dimiliki Sumsel idealnya bisa menyejahterakan masyarakatnya.

"Penyelamatan anggaran negara dari SDA sangat besar di Sumsel ini. Walaupun daerah ini adalah yang sangat kaya SDA, namun terjadi ironi bahwa masyarakatnya masih sangat miskin. Bahkan masuk daftar 10 daerah termiskin di Indonesia. Saya apresiasi langkah-langkah kejaksaan untuk menindak hal itu. Satu per satu harus diselesaikan," tutupnya.

mh/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Harga Tiket Meroket Harus Sepadan dengan Pelayanan



FOTO: BUNGA/AHA

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady (dengan mic), dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi V DPR ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/10/2024).

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady, menyoroti kenaikan harga tiket pesawat yang meroket setiap menjelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Karena itu, tambahnya, ia menekankan agar bagaimana kenaikan harga tiket pesawat itu sepadan dengan peningkatan pelayanan maskapai kepada penumpang.

Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi V DPR ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/10/). Kunsfik ini bertujuan untuk mengecek kesiapan fasilitas

angkutan udara dalam menghadapi lonjakan penumpang saat Libur Nataru yang akan datang. Kenaikan harga tiket dan pelayanan maskapai menjadi fokus perhatian mengingat tingginya permintaan selama musim liburan akhir tahun.

Dalam wawancara dengan **Parlementaria**, Hamka B. Kady mengungkapkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat sering kali menjadi keluhan masyarakat selama musim puncak (*peak season*) seperti Nataru. Meskipun pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, telah menetapkan aturan tarif batas atas dan batas bawah, Hamka mencatat bahwa mayoritas

maskapai cenderung menerapkan harga mendekati batas atas.

"Masyarakat teriak, meskipun Menteri Perhubungan sudah memberikan aturan resmi yaitu ada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Selama tidak melanggar aturan, itu tidak masalah. Tetapi hampir semua maskapai ambil tarif batas atas," ujar Hamka.

Ia menambahkan bahwa, meskipun harga tiket yang tinggi selama *peak season* tidak melanggar aturan, maskapai diharapkan memberikan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayar oleh penumpang.

— blf/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Penyelamatan Sritex Diminta Realistis dan Akuntabel



FOTO: DOK/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti rencana penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melalui intervensi pemerintah, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, Herman menekankan bahwa keinginan presiden untuk menyelamatkan sekitar 50.000 karyawan Sritex merupakan langkah penting, namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan realistis.

“Keinginan Pak Presiden untuk menyelamatkan karyawan yang besar jumlahnya ini tentu harus dibahas secara mendalam dan seksama. Selain itu, diperlukan pola penyelamatan yang benar-benar transparan sehingga tujuan tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa mengorbankan aspek lain,” ujar Herman dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Lebih lanjut, Herman menyatakan bahwa pengambilalihan Sritex oleh BUMN bukan keputusan sederhana, mengingat beban utang Sritex mencapai lebih dari Rp25 triliun,

tersebar di 28 bank. Menurutnya, penugasan semacam ini perlu memperhitungkan keuntungan dan risiko secara matang agar tidak membebani keuangan BUMN yang ditugaskan. Ia mengingatkan bahwa ada banyak pengalaman di mana tugas semacam ini justru membebani kondisi finansial BUMN.

“Kita punya pengalaman ketika penugasan kepada BUMN berakhir dengan beban finansial yang tidak sehat. Ke depan, upaya ini harus dijaga dengan cermat agar tidak justru menambah beban pada BUMN yang ditugaskan,” tambah Herman.

— aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kritik Wacana Impor Sapi, Sementara Peternak Lokal Kesulitan



FOTO: EOT/AHA

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Muzakir Aqil saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/10/2024). Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, alam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/11/2024).

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik wacana impor dua juta sapi perah yang tengah digulirkan pemerintah. Menurutnya, rencana tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup peternak sapi perah lokal yang saat ini tengah mengalami kesulitan finansial, bahkan di beberapa daerah, rekening usaha mereka diblokir oleh otoritas pajak.

“Saya melihat wacana impor dua jutasapi perah ini justru membuat miris, terutama karena ada 60 perusahaan yang sudah siap mengimpor sapi

tersebut. Di saat yang sama, di Boyolali, UD Pramono, sebuah usaha peternakan sapi perah yang menjadi tumpuan hidup banyak peternak, mengalami masalah. Rekening mereka diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti menyoroti bagaimana UD Pramono selama ini menjadi penopang ekonomi bagi para peternak kecil di Boyolali. Usaha ini tidak hanya membeli hasil susu dari peternak, tetapi juga memberikan pinjaman kepada mereka yang

membutuhkan bantuan finansial. Namun, kebijakan pemblokiran rekening yang terjadi di tengah wacana impor justru menimbulkan ketidakpastian bagi kelangsungan hidup mereka.

“Para peternak kecil di Boyolali sangat bergantung pada UD Pramono. Saat mereka kesulitan, usaha ini bahkan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada peternak. Ini ironi yang perlu perhatian serius, terutama jika kita ingin menguatkan ketahanan pangan dan mengembangkan ekosistem peternakan lokal,” lanjut Mufti. — aha



Fikri Dorong Peningkatan Pelayanan Haji 2025



FOTO: MUN/AHA

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran terkait di Gedung Senayan DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan haji pada 2025. Dalam rapat evaluasi Haji 2024 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar di Gedung DPR RI, Fikri meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pembenahan menyeluruh untuk menghindari masalah serupa di tahun mendatang.

“Kami menyarankan adanya diskusi terarah, seperti forum diskusi kelompok terpumpun (DKT), agar permasalahan yang pernah terjadi tidak terulang,” ujar Fikri dalam rapat Komisi VIII, Rabu (30/10/2024). Ia mengingatkan pentingnya evaluasi mendalam dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam persiapan.

Fikri mengapresiasi efisiensi

dana haji 2024 yang mencapai Rp 601,3 miliar dari nilai manfaat. Ia mengusulkan agar dana ini dialokasikan sebagai subsidi, guna mengurangi beban biaya jemaah hingga Rp 2,8 juta. Ia juga menyarankan pengurangan masa tinggal di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari, dengan

memanfaatkan tiga bandara tambahan di Saudi seperti Thaif, Yanbu, dan Qashim. “Dengan lobi tingkat tinggi, masa tinggal bisa dipangkas hingga 30 hari,” jelasnya.

Fikri turut menyoroti kinerja maskapai Garuda Indonesia yang tingkat ketepatan waktunya hanya 78,5%, lebih rendah dibandingkan Saudi Airlines yang mencapai 96,54%. Ia berharap Kemenag mempertimbangkan faktor ini dalam memilih maskapai untuk haji tahun depan.

Dalam aspek ekonomi, Fikri menyebut potensi dari pelaksanaan haji, termasuk pemanfaatan daging dam, ekspor bumbu nusantara, dan makanan siap saji. “Potensi nilai daging dam setara Rp 511 miliar, ini perlu dikelola dengan baik,” tegasnya.

Meski survei BPS menunjukkan peningkatan kepuasan jemaah, Fikri mengusulkan survei pascapelaksanaan haji untuk hasil yang lebih objektif. DPR berharap, melalui berbagai masukan ini, penyelenggaraan haji 2025 dapat memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan baik bagi jemaah.

— ssb/aha



ADANYA DISKUSI TERARAH, SEPERTI FORUM DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN (DKT), AGAR PERMASALAHAN YANG PERNAH TERJADI TIDAK TERULANG

Abdul Fikri Faqih
Anggota Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tekankan Penguatan Kelembagaan di Baznas dan BWI



FOTO: MUN/AHA

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (kedua kanan) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Nusantara II, DPR RI.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan agenda membahas program dan anggaran tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi penting untuk pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pencapaian pengumpulan zakat nasional hingga triwulan III-2024

yang berhasil mencapai Rp28,75 triliun. Angka ini, menurut Komisi VIII, menunjukkan kinerja yang signifikan dari Baznas dalam pengumpulan zakat. Namun, Komisi VIII meminta Baznas untuk terus memaksimalkan pencapaian ini agar target pengumpulan zakat nasional tahun 2025, yaitu sebesar Rp49,99 triliun, dapat tercapai.

“Untuk itu, Baznas didesak untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga amil zakat lainnya guna memperluas jangkauan dan efisiensi pengumpulan zakat,” papar Marwan di Gedung Nusantara

II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian penerimaan wakaf uang tahun 2024 yang mencapai Rp2,97 triliun. Komisi VIII mendorong BWI untuk lebih memaksimalkan potensi wakaf uang, yang diproyeksikan dapat mencapai hingga Rp181,97 triliun setiap tahunnya. BWI diminta untuk terus berinovasi dan meningkatkan program-program pengumpulan wakaf uang agar potensi besar ini dapat terealisasi secara optimal.

— ssb/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bambang Patijaya Jabat Ketua Komisi XII



FOTO: MRI/PDT

Wakil Ketua DPR Adies Kadir saat menetapkan jajaran ketua dan wakil ketua Komisi XII DPR RI periode 2024-2029, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi (F-Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto (F-Partai NasDem) dan Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan (F-PAN) di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Komisi XII DPR RI secara resmi telah menyepakati Pimpinan Komisi XII DPR RI dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Nama-nama tersebut yaitu Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi (F-Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto (F-Partai NasDem) dan Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan (F-PAN).

“Apakah nama-nama calon Pimpinan Komisi 12 DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui?”

tanya Adies dalam lantask dijawab, “setuju” secara serentak oleh segenap Anggota Komisi XII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Diwawancarai **Parlementaria** usai rapat, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut menerangkan dengan telah ditetapkannya Pimpinan Komisi XII, maka mulai per hari ini Komisi XII yang membidangi energi ini sudah dapat bekerja melaksanakan tugas fungsinya dengan segenap mitra kerja.

“Komisi ada ESDM di sana, kemudian ada Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup,

saya rasa bisa berjalan dengan baik dan sinergi ini kan sudah tinggal melanjutkan saja,” tandas Politisi Partai Golkar ini seraya meluruskan bahwa benar ada kendala dalam penetapan Pimpinan Komisi XII.

“Bahwa ini mungkin karena mitra baru ya dan titik berat dari Pemerintah sekarang terkait dengan hilirisasi energi dan lain sebagainya. Jadi mungkin para Pimpinan-Pimpinan Fraksi agak berhati-hati untuk menempatkan orang dan harus cermat. Jadi ya itulah, tapi saya rasa tidak mengganggu kegiatan kedewanan karena ini masih minggu kedua ya. Saya rasa bisa berjalan dengan baik,” pungkas Adies.

— pun/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pentingnya Penguatan Peran Sipil dan Pemajuan HAM



FOTO: MR/PDT

Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus, menekankan pentingnya penguatan peran sipil dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Edison menyatakan bahwa dengan latar belakang presiden yang berasal dari militer, Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menjaga prioritas HAM. Ia mengingatkan potensi risiko pelanggaran HAM jika

masyarakat tidak mendapat ruang bicara yang aman. "Saya khawatir, jika tidak berhati-hati, pelanggaran HAM justru bisa meningkat karena orang merasa bebas berbicara tetapi malah dianggap berlebihan, bahkan berisiko dituduh hal-hal lain, seperti terorisme," ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Dalam hal anggaran, Edison menyoroti usulan tambahan Rp20 triliun untuk program-program Kementerian HAM. Ia menilai anggaran tersebut tidak terlalu besar bagi Indonesia, namun perlu ada kejelasan dan prioritas dalam alokasi. "Kita harus tahu apa yang lebih dulu dibangun, baik sarana fisik maupun

mental, untuk memastikan HAM dan aspek sipil tetap kuat," tegasnya.

Ia juga mengajak pemerintah untuk memiliki pandangan ke depan, dan tidak terus-menerus membahas pelanggaran HAM masa lalu. "Kita perlu pandangan ke depan untuk membangun negara yang benar-benar melindungi hak asasi, tentu hak asasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," ungkapnya di akhir sesi pandangan.

Rapat ini diadakan untuk membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian HAM yang diusulkan Menteri Natalius Pigai.

— **ssb/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi XIII: Komisi Baru, Spirit Baru



FOTO: OLI/PDT

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (Kanan) dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya (Kiri) beserta Pimpinan Komisi XIII lainnya.

Pimpinan Komisi XIII DPR RI melakukan Rapat Konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir guna membahas beberapa agenda serta prioritas undang-undang untuk satu tahun ke depan. Termasuk juga mengenai *supporting system* yang diperlukan Komisi XIII sebagai komisi baru.

“Pak Adies memberikan banyak pandangan, banyak masukan untuk bagaimana termasuk karena kita kan belum ada ruang pimpinan, *supporting system*-nya, ruang sekretariatnya juga belum ada. Tapi tidak mematahkan spirit kita lah. Yang

penting ini kan komisi baru, spiritnya baru, walaupun yang lain-lain masih terbatas,” ujar ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Terkait beberapa undang-undang yang akan menjadi prioritas Komisi XIII kedepan, Ia menyatakan masih akan menunggu dan memastikannya setelah melakukan rapat kerja dengan para mitra. Namun diantaranya yang mungkin akan menjadi pembahasan ke depan yakni undang-undang mengenai HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Perampasan Aset.

“Kementerian HAM kan masih Perpres, waktu itu BPIP kan sempat

kita inisiasi terus mandek ya, nanti kita akan tinjau ulang, dan beberapa hal yang lain. Termasuk juga koordinasi perampasan aset akan dimana, kami sempat tanya. Jadi koordinasi apakah itu lintas komisi atau bagaimana?” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Adapun terkait dengan tantangan ke depan sebagai komisi baru, menurutnya yang akan menjadi perhatian terutama terkait isu HAM adalah *ecosoc (economy and social council)*. Sehingga akan menitik beratkan kepada persoalan HAM yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya bukan lagi soal politik saja.

— gal/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bahas Isu Deforestasi hingga Peningkatan Jumlah Perawat



FOTO : MRI/PDT

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera foto bersama usai mengadakan pertemuan (*friendly talk*) dengan Anggota Parlemen Jerman, Gabriele Katzmarek di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengadakan pertemuan (*friendly talk*) dengan Anggota Parlemen Jerman, Gabriele Katzmarek. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas berbagai isu, mulai dari peran perempuan, pemuda, ekonomi, hingga kebijakan deforestasi yang diinisiasi oleh Eropa.

Mardani menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak hanya untuk mempererat kerja sama bilateral, tetapi juga untuk memperkenalkan

Yayasan *Friedrich Ebert Stiftung* (FES), sebuah yayasan dari Jerman yang fokus pada pengembangan demokrasi di tingkat masyarakat.

“Banyak topik yang dibahas, mulai dari isu perempuan, pemuda, pengembangan ekonomi, hingga rencana yayasan internasional seperti FES yang aktif di Indonesia,” ujar Mardani kepada **Parlementaria** usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Selain membahas kerja sama bilateral, Mardani yang didampingi Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga, dan Muhammad Husein

Fadlulloh, juga menyoroti kebijakan deforestasi Eropa, yaitu *European Union Deforestation-free Regulation* (EUDR). Menurut mereka, kebijakan ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi industri kelapa sawit di Indonesia.

“Kami berharap Indonesia dan Jerman dapat menemukan solusi bersama. Kami juga menyampaikan bahwa banyak pabrik kelapa sawit di Indonesia telah mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan, dan mereka melihat perkembangan ini dengan positif,” jelas Mardani.

— **bia/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Angkat Martabat Indonesia di Kancah Global



FOTO:PRIMA

Foto bersama penetapan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu saja, ia berkomitmen memperkuat hubungan bilateral dan multilateral yang telah terjalin bersama Indonesia.

“(BKSAP) DPR (ke depannya) berusaha menciptakan hubungan (diplomasi) yang lebih lentur dan juga akan berusaha memperkuat hubungan (sudah) yang terjalin. Kami akan mengusahakan mengangkat harkat martabat Indonesia di panggung internasional,” tutur Mardani kepada Parlementaria usai pelantikan.

Selaras dengan arahan kebijakan luar negeri yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, ia akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Melalui BKSAP DPR, sebutnya, parlemen Indonesia berusaha akan merumuskan program kerja yang komprehensif namun tetap efektif dalam waktu dekat.

“Pertama, BKSAP akan support Palestina. Besok akan lebih didetailkan karena kami sangat terharu dan termotivasi ketika ketua MPR maupun presiden, Pak Prabowo, itu betul-betul mengangkat isu Palestina. Jadi, tentu, kami akan menunjukkan support dan dukungan penuh kemerdekaan Palestina,” ungkapnya. [um/aha](#)

DPR RI telah menetapkan pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). Penetapan pimpinan tersebut disahkan secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua BKSAP DPR RI periode 2024-2029 Mardani Ali Sera yang ditetapkan itu menyatakan akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ruang Berkala Pelaporan Kinerja BAKN di Paripurna



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron dalam audiensi dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron mewacanakan akan kembali melakukan penyampaian laporan kinerja BAKN secara berkala di Rapat Paripurna DPR RI. Ia menekankan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BAKN kepada publik. Hal ini disampaikan dalam audiensi dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin (28/10).

“Sebelumnya, BAKN itu melaporkan (hasil telaahan dan kinerja) dalam durasi berkala,

waktu tertentu melaporkan kinerja BAKN di paripurna dan ini sempat berhenti dalam beberapa periode ini. Kami berpikir bahwa (laporan ini) sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia, pertanggungjawaban kepada pimpinan DPR, pertanggungjawaban kepada publik,” ujar Herman.

Herman menegaskan bahwa transparansi dalam laporan kinerja sangat penting untuk menjaga akuntabilitas BAKN. Herman lantas membandingkan dengan Badan Legislasi DPR RI yang selalu memberikan laporan usai merampungkan undang-undang dan/atau Badan Anggaran DPR RI yang kerap memberikan laporan

dalam siklus anggaran setiap tahunnya.

“Kami meminta agar juga diberikan ruang yang lebih terbuka untuk kami mendalami berbagai persoalan dan melaporkannya secara berkala di Paripurna. Ini merupakan pertanggungjawaban kami kepada publik,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen BAKN untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan hasil kerja mereka kepada masyarakat. Herman berharap adanya dukungan untuk memperluas ruang bagi BAKN dalam menyampaikan laporan-laporan tersebut di masa mendatang. **uc/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Andreas Eddy Jadi Ketua BAKN, Siap Kawal Penggunaan Uang Negara



FOTO: MBR/PDT

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, usai menetapkan pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk masa keanggotaan 2024-2029 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, DPR RI menetapkan susunan pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk masa keanggotaan 2024-2029. Rapat penetapan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, tersebut menyepakati Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua BAKN. Andreas akan didampingi oleh empat wakil ketua, yaitu Andi Achmad Dara (Fraksi Partai Golkar), Endipat Wijaya (Fraksi Partai Gerindra), Habib Idrus Salim Aljufri

(Fraksi PKS), dan Herman Khaeron (Fraksi Partai Demokrat).

Penetapan pimpinan ini menjadi langkah penting dalam memastikan peran BAKN sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang bersifat tetap. Dalam rapat yang digelar di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) Adies Kadir, menanyakan kepada para anggota BAKN, “Apakah susunan Pimpinan BAKN sebagaimana tersebut dapat disetujui?” Pertanyaan tersebut dijawab serentak dengan kata “setuju” oleh seluruh anggota yang hadir, menandai kesepakatan bulat terhadap susunan pimpinan tersebut.

BAKN, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, memiliki peran sentral dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPR.

Penelaahan ini kemudian dilaporkan kepada komisi terkait untuk ditindaklanjuti. Dengan kemitraan strategis bersama BPK, BAKN diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

— ssb/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Terima Audiensi DPRD Salatiga Soal Pencabutan Perpres 53

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh. Haris menerima audiensi dari DPRD Kota Salatiga. Dalam audiensi tersebut, DPRD Kota Salatiga menyampaikan aspirasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

Diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung RI telah mengabulkan

permohonan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023. Perpres tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah kembali menggunakan SHSR sebelum adanya perubahan. Dengan dicabutnya Perpres Nomor 53 Tahun 2023, akan mengubah pola pembayaran perjalanan dinas bagi anggota DPRD, yang semula lumpsum menjadi *at cost* (biaya riil).

Terhadap aspirasi tersebut, Haris mengatakan akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada Komisi II DPR RI. “Problem Perpres Nomor 53 yang dirasa memberatkan kepada teman-teman karena basis anggarannya kembali ke *at cost*, ke biaya riil, ini dirasa berat bagi teman-teman dalam era sekarang ini. Nah, oleh karena itu mengadukan kepada kami, di DPR RI, melalui Badan Aspirasi Masyarakat untuk disampaikan kepada komisi terkait dan pemerintah untuk dikaji kembali,” kata Muh Haris, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, DPRD Salatiga berharap BAM dapat diadopsi di level kabupaten/kota atau provinsi. Anggota DPRD Salatiga Bagas Aryanto mengatakan BAM menjadi bagian penting bagi lembaga legislatif. Sebab, selain memiliki tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, lembaga legislatif juga memiliki tugas untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

— [bia/rdn](#)



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh. Haris saat menerima audiensi dari DPRD Kota Salatiga di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

FOTO: JKA/PDT

MKD Periode Baru Tegakkan Muruah DPR



FOTO: PRIMA

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal berfoto bersama usai menetapkan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

DPR RI telah menetapkan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). Penetapan pimpinan tersebut disahkan secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam forum, Politisi Fraksi PKB itu menegaskan pemilihan pimpinan MKD DPR diselenggarakan dengan berpegang prinsip musyawarah mufakat. Di mana, prinsip itu selaras

dengan UU MD3.

“Usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah lalu di mana sesuai dengan rapat konsultasi pada tanggal 21 Oktober 2024 salah satunya menyepakati komposisi fraksi-fraksi para pimpinan AKD,” tutur Cucun.

Menutup pernyataan, ia berharap MKD DPR bisa secara konsisten menegakan kehormatan dan martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tidak hanya itu saja, melalui MKD DPR, dirinya berharap menjadi MKD DPR, dirinya berharap menjadi AKD yang turut mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia.

Selaras dengan amanah yang diemban, Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyatakan siap ‘gaspol’ bekerja untuk menjaga muruah legislatif. Salah satu program kerja yang akan segera dilakukan, jelasnya, adalah membuka akses informasi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR periode 2024-2029.

“Jika benar terjadi pelanggaran, maka kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan, tapi tidak terbukti ada pelanggaran maka kami rehabilitasi nama baik anggota DPR yang dilaporkan,” ungkap Nazaruddin. — **um/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pelayanan Kunjungan Museum DPR Terus Disempurnakan



FOTO: FHN/PDT

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Rahmad Budiaji berfoto bersama usai menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10). Agenda tersebut diselenggarakan untuk memperoleh masukan yang konstruktif guna menyempurnakan draf standar pelayanan kunjungan edukasi parlemen dan kunjungan museum DPR RI yang dilakukan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat DPR RI.

“Forum konsultasi publik itu bagian dari proses bisnis ketika kita akan menyusun standar pelayanan yang

hari ini di dua layanan, kunjungan edukasi parlemen dan kunjungan museum. Dengan penyelenggaraan FKP ini kita berharap pelayanan yang disusun akan mencerminkan keinginan, akan mencerminkan kebutuhan bagi pengguna layanan,” ujar Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI Rahmad Budiaji kepada **Parlementaria**.

FKP ini selain untuk penyempurnaan standar pelayanan juga diharapkan untuk dapat menjadi perbaikan organisasi dengan memperoleh masukan daripada pengguna layanan dengan melibatkan stakeholders yang terlibat dalam pemberian layanan. Dimana penilaian layanan publik ini

selalu dilakukan dan dievaluasi setiap tahunnya secara nasional oleh Ke-menterian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke-menPAN RB).

“Kita berharap capaian skor indeks pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR RI secara keseluruhan terus meningkat dan mencapai yang tertinggi yaitu layanan prima. Tentu kita punya kesadaran bahwa perbaikan itu tidak pernah berhenti, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi kami memahami bahwa penjaminan mutu itu bisa dilakukan kalau kita selalu memperbaiki diri,” pungkasnya.

gal/aha



Kolaborasi Media dengan Setjen DPR, Beritakan Kegiatan Kedewanan



FOTO: PRIMA

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Suprihartini saat memberikan laporan pembuka pemilihan umum Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus acara Forum Komunikasi Dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan tema “DPR Baru Harapan Baru: Perkokoh Kolaborasi Media & DPR RI 2024-2029” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Suprihartini, menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi yang solid antara media massa dan Setjen DPR RI memiliki arti strategis dalam membangun citra DPR RI yang transparan dan bertanggung jawab.

Hal ini diungkapkannya saat memberikan laporan pembuka pemilihan umum Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus acara Forum Komunikasi Dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan tema

“DPR Baru Harapan Baru: Perkokoh Kolaborasi Media & DPR RI 2024-2029” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11).

“Media massa berperan menjembatani informasi antara Anggota Dewan dengan konstituen di seluruh daerah. Dengan demikian, keberadaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen diharapkan semakin memperkuat peran media dalam menginformasikan kegiatan kedewanan kepada masyarakat, khususnya selama masa jabatan DPR RI 2024-2029,” ujarnya kepada saat memberikan pidato di acara tersebut.

Suprihartini juga menyadari bahwa kemitraan antara Setjen DPR RI dengan wartawan bukan hanya tentang informasi yang disampaikan, tetapi juga tentang kepercayaan yang dibangun bersama. “Sinergi ini harus kita pelihara dengan prinsip saling mendukung demi tercapainya visi DPR RI yang responsif, transparan, dan berdaya guna,” tambahnya.

Melalui acara pemilihan Ketua KWP tahun 2024 ini, Suprihartini berharap agar kepemimpinan yang terpilih dapat menjadi jembatan yang kuat antara DPR RI dan masyarakat. “Kami di Setjen DPR RI siap memberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai kemitraan strategis ini,” tutupnya. — pdt/aha



MEDIA MASSA BERPERAN MENJEMBATANI INFORMASI ANTARA ANGGOTA DEWAN DENGAN KONSTITUEN DI SELURUH DAERAH. DENGAN DEMIKIAN, KEBERADAAN KOORDINATORIAT WARTAWAN PARLEMEN DIHARAPKAN SEMAKIN MEMPERKUAT PERAN MEDIA DALAM MENGINFORMASIKAN KEGIATAN KEDEWANAN KEPADA MASYARAKAT

Suprihartini

Deputi Persidangan Setjen DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Bahas Isu Kontemporer dan Peluang Kerja Sama



FOTO: GER/PDT

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul menerima kunjungan dari dosen dan guru besar University of Leiden, Belanda di Gedung Setjen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul menerima kunjungan dari dosen dan guru besar *University of Leiden*, Belanda. Samsul, sapaan akrabnya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya dan para pengajar dari *University of Leiden* berdiskusi banyak hal. Mulai dari isu-isu kontemporer hingga program-program kerja bersama di masa mendatang.

“Sebenarnya diskusi saja, diskusi tentang masalah-masalah kontemporer yang bisa kita bangun bersama. Ide kan bisa di sini, kalau nanti mungkin ide kayak tadi misalnya, kalau ada program misalnya ada yang mau dikirim untuk S2, S3 ke sana kita akan coba usahakan,”

kata Samsul usai pertemuan di Gedung Setjen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Samsul juga menjelaskan, berbagai program kerja sama yang kerap dilakukan bersama universitas luar negeri biasanya bersifat program pendidikan, seperti *short course* untuk staf di Setjen DPR RI

“Misalnya mengirim untuk *short course* kesana, kemarin itu kan mengenai digital law. Nah nanti mungkin ke depan ada lagi program lain yang mereka buat sehingga kita menjadi peserta di dalamnya,” terangnya.

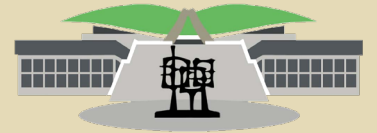
Lebih lanjut, Samsul menerangkan bahwa staf di Setjen DPR RI haruslah terbiasa dengan pola dan suasana lingkungan akademis. Hal ini penting guna meng-*upgrade* diri menjadi lebih baik, baik dari segi pengetahuan maupun *skill* dalam bekerja.

“Jadi selama ini kan kita sudah bangun mitra dengan universitas di Indonesia. Tetapi ke depan dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di luar negeri yang besar pun, sebenarnya kita mestinya bisa berkolaborasi,” pungkasnya. **we/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya





**Wakil Ketua DPR RI Cucun
Ahmad Syamsurijal
saat meninjau SMAN 5
Balikpapan di Kalimantan
Timur, Sabtu (2/11/2024)
FOTO: DEP/PDT**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya